

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian akan mengangkat judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Kepada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Cipete Utara” yang akan dilakukan di daerah teritorial Jakarta Selatan. Dalam melakukan penelitian alangkah baiknya jika melakukan peninjauan terhadap penelitian yang relevan dan sudah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga contoh penelitian yang relevan dan sudah ada sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan pembanding atau referensi dalam melakukan penelitian terkait Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Kepada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Cipete Utara.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Eko Yudianto Yunus (2019)	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Kualitatif	Persamaan: Jumlah bantuan yang diterima KPM belum sesuai. Perbedaan: Teori yang digunakan dari Van Meter Van Horn sedangkan penulis menggunakan teori George Edward III.

2	Wahyudi (2019)	Pendistribusian Dana KKS Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Rejo Asri VIII)	Kualitatif	<p>Persamaan: Penerimaan bantuan masih belum merata.</p> <p>Perbedaan: Perkembangan teknologi di lokasi penelitian yang dipilih penulis, yaitu Kelurahan Cipete Utara sudah lebih maju.</p>
3	Basriati. B (2021)	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa	Kualitatif	<p>Persamaan: Menggunakan teori dari George C. Edward III.</p> <p>Perbedaan: Kondisi sosial, ekonomi dan politik pada penelitian yang dilakukan penulis jauh berbeda karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.</p>

2.2 Konsep Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat tindakan-tindakan dan proses kegiatan dalam hal ini implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan suatu program dapat ditinjau menurut implementasinya. Tujuan implementasi yaitu untuk mencapai keberhasilan suatu program. Pengertian terkait implementasi disampaikan oleh Grindle dalam Akib yang mengatakan bahwa implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya

baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan sudah disusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran".⁵

Implementasi menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Meter dan Horn yang mengatakan bahwa tugas implementasi ialah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Implementasi adalah memahami apa yang secara nyata terjadi setelah suatu program resmi dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah diberlakukannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁶

Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.⁷ Dalam tatanan praktis implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses pelaksanaan tersebut terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana

⁵ Grindle, M. S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press. (1980).h.47

⁶ Wahab, S. A, *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014

⁷ Mulyadi, Deddy. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015. h.12

- 3) Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan atau kebijakan tersebut
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun yang tidak
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh instansi pelaksana
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan-undangan

Pengertian lain tentang konsep implementasi juga dikemukakan oleh Grindle yang mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.⁸ Menambahkan lagi bahwa proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran kebijakan sudah ditetapkan, program kegiatan sudah tersusun dan dana sudah siap, serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Selain itu Horn dalam Tahir juga mengatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik itu oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan/atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang sudah digariskan sebelumnya dalam kebijakan.⁹ Van Meter dan Van Horn menyampaikan beberapa unsur yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- 2) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana

⁸ Ibid. h.15

⁹ Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik & Transparansi: Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.h.55.

- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (contohnya seperti dukungan antara anggota legislatif dan eksekutif)
- 4) Tingkat komunikasi "terbuka" yang dapat dikatakan bahwa jaringan kerja komunikasi horizontal ataupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu di luar organisasi
- 5) Vitalitas suatu organisasi
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Matland dalam Hamdi implementasi kebijakan secara umum dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan dari atas (*topdown*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*).¹⁰ Menurut Anderson dalam Tahir, dikata bahwa dalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat empat faktor yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Siapa saja yang dilibatkan dalam implementasi
- 2) Hakikat proses administrasi
- 3) Kepatuhan terhadap kebijakan yang dibuat

¹⁰ Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.h.98.

4) Efek atau dampak yang muncul dari implementasi¹¹

Menurut Purwanto dalam Syahida juga dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan suatu proses implementasi, antara lain:

- 1) Kualitas kebijakan
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama yang berkaitan dengan anggaran)
- 3) Ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lain-lain)
- 4) Kapasitas implementor
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak dan lain sebagainya)
- 6) Kondisi lingkungan baik secara geografi, sosial, ekonomi, dan politik¹²

Dalam mengukur keberhasilan suatu program terletak pada proses implementasinya, pada tahap implementasi ini merupakan tahap yang paling penting dalam keseluruhan suatu program. Implementasi program BPNT dapat dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tidak terlepas dari monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwar III bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang krusial

¹¹ Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik & Transparansi: Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.h. 56-57

¹² Syahida, Agung Bayu. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). *Jurnal Umrah*. Vol.1. No.1. 2014.h.13.

karena sebaik apapun suatu kebijakan jikalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang diharapkan atau menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.¹³ Implementasi dari George C. Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi oleh asumsi bahwa apabila para implementor dapat mengikuti standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak pernah sempurna dan tidak terlepas dari kekuatan-kekuatansosial dan politik yang melengkapinya.

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang disampaikan oleh George C. Edward III. Implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edward III ada empat aspek dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*Resources*), sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*).¹⁴

Keempat faktor diatas harus dijalankan secara simultan, karena antar satu dengan lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara diturunkan (*mem-breakdown*) melalui eksplanasi implementasi kedalam

¹³ Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.1980.h.1

¹⁴ Ibid

komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis yang meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan, dengan begitu dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edward III sebagai berikut:

1) Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Faktor komunikasi ini dalam proses implementasi dapat berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik dengan begitu implementor dapat memahami secara tepat terkait ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Menurut George C. Edward III dalam Widodo mengatakan bahwa, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).¹⁵

¹⁵ Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.2010.h.97.

- Dimensi transmisi (*transmission*) adalah dimensi yang menghendaki agar kebijakan publik disampaikan bukan hanya kepada implementor kebijakan tetapi disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Dimensi kejelasan (*clarity*) adalah dimensi yang menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan secara jelas kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan sehingga mereka dapat mengetahui serta memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut, dengan begitu masing-masing dari mereka akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Dimensi konsistensi (*consistency*) adalah dimensi yang menghendaki agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak lain yang berkepentingan tidak merasa bingung.

Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif harus ada pihak yang bertanggungjawab dalam mengambil keputusan, pihak tersebut juga harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya atau tidak. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personal agar dapat memahami secara jelas dan akurat maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Jika ada aktor pembuat kebijakan yang melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan dapat diartikan bahwa mereka tidak memahami apa yang sesungguhnya akan diarahkan. Hal tersebut dapat menyebabkan para implementor

kebijakan merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan, sehingga jika dipaksakan maka tidak akan mendapat hasil yang efektif dan optimal. Kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan.¹⁶

2) Sumberdaya (*Resources*)

Menurut George C. Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.¹⁷

- Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya manusia ini meliputi jumlah implementor serta keahlian yang dimiliki oleh implementor.
- Sumberdaya anggaran. Menurut George C. Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. George C. Edward III dalam Widodo pun menarik kesimpulan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan baik/optimal, keterbatasan anggaran juga menyebabkan sikap atau disposisi para pelaku kebijakan menjadi rendah.¹⁸

¹⁶ Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. (1980). h.57

¹⁷ Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.2010.h.98.

¹⁸ Ibid.h.101

- Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk proses implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan mempermudah proses pelayanan dalam implementasi kebijakan.¹⁹

- Sumberdaya kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah dan menuntut mereka untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dengan suatu keputusan.²⁰

Dapat dikatakan bahwa komponen sumber daya ini terdiri dari jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan guna pemenuhan sumber- sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan.

Informasi merupakan bagian sumberdaya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi, yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagi pelaksanaan

¹⁹ Ibid.h.102

²⁰ Ibid.h.103

harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru. Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, sumberdaya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur atau membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi seperti adanya kantor, tersedianya peralatan kantor, serta dana yang cukup, jika fasilitas ini tidak terpenuhi maka mustahil program dapat berjalan.

3) Sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*)

Sikap atau Disposisi menurut George C. Edward III dalam Widodo dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.²¹ Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk

²¹ Ibid.h.104

melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin-poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi program akan mengalami kesulitan dan bahkan dapat menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk respon implementor terhadap kebijakan yang dibuat, yaitu adanya kesadaran implementor, petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin dapat memahami maksud sasaran program namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut terjadi karena mereka melakukan penolakan terhadap tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara diam-diam mereka mengalihkan dan menghindari implementasi program tersebut.

Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat berdampak pada pelaksanaan program agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dukungan dari pimpinan diwujudkan dengan cara menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan daerah, agama, jenis kelamin, suku dan karakter demografi lainnya.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi ini menurut George C. Edward III dalam Widodo mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.²² Struktur birokrasi tidak terlepas dari badan pelaksana kebijakan, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang-ulang. Badan-badan eksekutif mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Menurut George C. Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Menurut Winarno, *Standard Operational Procedure* (SOP) adalah perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.²³ Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.²⁴

Implementasi masih dikatakan gagal ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan meskipun sumberdaya sudah cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Kebijakan yang kompleks

²² Ibid.h.106

²³ Winarno. Teori dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press. 2005. h.150

²⁴ Ibid.h.155

mempertuhkan kerjasama dari banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya dapat mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2.4 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1) Pengertian Program BPNT

Program BPNT merupakan salah satu program bansos regular yang dikeluarkan oleh pemerintah semenjak tahun 2017 dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Sistem baru dari penyaluran bantuan pangan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar.²⁵ Pembiayaan operasional program BPNT sendiri bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
3. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat

Suatu wilayah juga harus memenuhi kriteria tertentu agar warganya dapat menerima BPN, kriteria yang harus dipenuhi oleh lokasi tersebut yaitu, tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi dan

²⁵ Bab II Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

terdapat e-warong. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau melalui program BPNT dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BPNT diberikan kepada KPM yang sudah terdaftar pada DTKS dengan cara memberikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan atau sembako yang sudah ditentukan di e-warong, sehingga dalam proses transaksi pembeliannya menggunakan sistem perbankan, dengan begitu diharapkan setiap KPM dapat memperoleh gizi yang lebih seimbang.



Sumber: <https://dinsos.bantenprov.go.id/bantuan-sosial-panganprogramsembako>

Dalam menjalankan program BPNT terdapat mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan, antara lain:

1. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal dari pelaksanaan program BPNT, dalam tahap ini dilakukan koordinasi pada lembaga pemerintahan. Mulai dari koordinasi di tingkat pemerintah pusat guna membuat dan memastikan dasar hukum kebijakan, membuat mekanisme pelaksanaan di lapangan serta membuat prosedur administrasi lainnya. Selanjutnya koordinasi di tingkat pemerintah provinsi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT. Terakhir koordinasi di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan bank penyalur, memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong.

2. Penyerahan Data KPM

Di tahap ini bank penyalur akan menerima data KPM atau penerima bantuan dari Kemensos. Bank penyalur di setiap daerah juga berbeda-beda sesuai dengan penunjukan dari pemerintah. Status kepesertaan KPM pada program BPNT juga dapat berganti karena beberapa hal antara lain:

- Meninggal dunia

- Pindah rumah
- Sudah mampu secara ekonomi
- KPM itu sendiri yang menolak menerima bantuan
- Memiliki kepesertaan ganda
- Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi

KKS

Sedangkan untuk perubahan atau penggantian pemegang rekening KPM BPNT dapat dilakukan apabila:

- Pindah alamat
- Tidak ditemukan di alamat
- Meninggal dunia
- Menjadi pekerja migran Indonesia
- Mengalami kedisabilitas sehingga kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya pada orang lain
- Mendapatkan putusan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

3. Persiapan E-warong

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh bank penyalur untuk menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi e-warong dalam penyaluran BPNT, antara lain:

- Memastikan jumlah e-warong di setiap lokasi penyaluran
- Memberikan pelayanan perbankan kepada e-warong

- Melakukan pemasaran, edukasi dan sosialisasi, perbaikan sistem atau fasilitas e-warong dan lainnya guna memberikan pelayanan yang baik untuk KPM
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan

4. Edukasi dan Sosialisasi

Salah satu hal penting dalam implementasi program BPNT adalah kegiatan edukasi dan sosialisasi, kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada KPM terkait tujuan dan mekanisme program BPNT. Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT dilakukan oleh:

- Pemerintah pusat
- Bank penyalur
- Pemerintah daerah provinsi
- Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan

5. Registrasi, Pembukaan Serta Distribusi KKS

Dalam tahap ini, bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi KKS dan berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten/Kota. Pembuatan rekening KPM tersebut harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur. Setelah itu bank penyalur

akan mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM yang terdaftar sebagai penerima BPNT. Proses ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi

6. Penyaluran BPNT

Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.²⁶ Penyaluran BPNT dilakukan dengan sistem transfer kepada KPM melalui bank penyalur. Setiap KPM yang telah menerima KKS dari bank akan menerima bantuan senilai Rp. 200.000 per bulan, selanjutnya uang tersebut dapat dibelanjakan di e-warong untuk membeli bahan pangan atau sembako yang telah ditentukan. Penyaluran BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

- Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
- Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang diperlukan. Termasuk juga kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini

²⁶ Website: <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15767289355623.pdf> (Diakses pada tanggal 01 April 2022 pukul 22.00 WIB)

- Mendorong pengusaha eceran atau pedagang kecil untuk mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan mereka dengan melayani KPM
- Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM

7. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana bantuan program BPNT digambarkan sebagai berikut:

- Datang: KPM datang ke e-warong dengan membawa KKS
- Pilih: KPM dapat memilih jenis dan jumlah bahan pangan yang ingin dibeli selama bahan pangan tersebut masih sesuai dengan aturan yang ditentukan pemerintah
- Bayar: KPM melakukan proses pembayaran dengan menggunakan KKS, untuk caranya sama seperti transaksi dengan menggunakan kartu ATM pada umumnya yaitu dengan cara memasukkan PIN pada mesin EDC
- Terima: KPM dapat membawa pulang sembako yang dibelinya serta mendapat cetak resi dari mesin EDC

2) Tujuan Program BPNT

Berdasarkan bab I pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, tujuan dari program BPNT antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT.
3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

3) Manfaat Program BPNT

Berdasarkan bab I pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, manfaat dari program BPNT antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan pada KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan transaksi secara non tunai untuk mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
4. Meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.²⁷

4) Syarat dan Proses Pendaftaran Program BPNT Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Syarat Penerima Program BPNT

Ada beberapa hal yang mengakibatkan beberapa masyarakat miskin di Indonesia tidak dapat menerima BPNT, karena untuk dapat menerima bantuan tersebut setiap KPM harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Persyaratan yang harus terpenuhi antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Masuk kedalam kriteria warga miskin atau rentan miskin
- Terdampak pandemi Covid-19 dengan kehilangan pekerjaan
- Bukan merupakan anggota TNI/Polri, ASN/PNS, dan pegawai BUMN/BUMD
- Tidak termasuk penerima bansos lain dari pemerintah
- KPM telah terdaftar di DTKS

²⁷ Ibid

2. Proses Pendaftaran Program BPNT Pada Masa Pandemi Covid-19

- Semenjak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, segala hal sebisa mungkin dilakukan melalui sistem online/daring untuk mengurangi penyebaran virus. Begitu pula dengan proses

pendaftaran program BPNT pada masa pandemi Covid-19 yang sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Cek Bansos. Berikut langkah pendaftaran program BPNT secara online:

- Unduh atau download terlebih dahulu aplikasi Cek Bansos melalui Play Store di HP atau smartphone.
- Jika sudah, buka aplikasi Cek Bansos dan lakukan registrasi akun dengan klik tombol “Buat Akun Baru”.
- Untuk memudahkan pengisian data, siapkan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Setelah itu, masukkan data sesuai kolom yang diminta.
- Tambahkan lampiran dua jenis foto, yakni swafoto dengan KTP, dan foto KTP.
- Jika sudah, cek kembali data yang diisi apakah sudah benar dan sesuai. Kemudian, klik “Buat Akun Baru”.
- Setelah registrasi berhasil, akses menu pada Aplikasi Cek Bansos. Kemudian, pilih menu “Daftar Usulan”.

- Selanjutnya, klik menu "Tambah Usulan". Kemudian, isi data sesuai kolom yang diminta.

Namun pendaftaran secara langsung juga dapat dilakukan melalui aparat pemerintahan setempat, seperti RT/RW atau petugas kelurahan/desa. Masyarakat hanya perlu membawa berkas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Masyarakat nantinya akan diajukan untuk menjadi KPM di data DTKS Kemensos untuk menerima BPNT. Setelah melakukan pendaftaran secara langsung, masyarakat dapat mengecek apakah mereka sudah terdaftar sebagai KPM penerima BPNT atau belum melalui situs resmi Kemensos yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Jika sudah terdaftar sebagai penerima BPNT, maka setiap KPM nantinya akan menerima bantuan sebesar Rp. 2.400.000 per tahun, namun diberikan secara bertahap setiap sebulan sekali dengan nominal sebesar Rp. 200.000.

2.5 Kerangka Pemikiran

Implementasi Program BPNT pada masa pandemi Covid-19 terhadap masyarakat miskin disalurkan kepada KPM melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu berupa persiapan, penyerahan data KPM, persiapan e-warong, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan pembukaan akun untuk selanjutnya proses distribusi KKS, penyaluran BPNT dan yang terakhir tahap pemanfaatan. Maka dari itu pemerintah harus melakukan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data pada DTKS secara rutin. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyaluran BPNT yang tidak tepat sasaran.

Dalam meneliti implementasi program BPNT pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat miskin di kelurahan Cipete Utara, penulis mengangkat beberapa indikator yang berkaitan dengan tahap penyaluran BPNT. Kerangka pemikiran dari penelitian ini sendiri diawali dari pengangkatan latar belakang masalah-masalah yang ada di masyarakat terkait implementasi program BPNT, kemudian meneliti kesesuaian antara pelaksanaan program dengan landasan atau dasar hukum yang ada. Meneliti pula kaitan dan kesesuaian teori dari para ahli dengan tema penelitian yang penulis pilih untuk pada akhirnya dapat menyimpulkan apakah program tersebut sudah berhasil atau belum.

Tabel 2.5

Kerangka Pemikiran

